



Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti Kampus Terpadu Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah.

KR-istimewa

PRESIDEN RESMIKAN KAMPUS MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH

Haedar: Indonesia Punya Modal Sosial Hebat

BANTUL (KR) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan, bangsa Indonesia punya modal sosial yang hebat. Karena itu, Indonesia harus menjadi negara modern tetapi juga merawat budaya asli kita dan tanpa kehilangan hubungan kita dengan bangsa-bangsa lain jadi ini yang menjadi penting.

Hal tersebut dikatakan Haedar saat menerima kunjungan dan peresmian Kampus Terpadu Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (10/9).

Seperti Muhammadiyah, kata Haedar, tidak lelah terus melakukan gerakan untuk membangun bangsa, hal ini pun mendapatkan respons positif dari Presiden. Melihat semangat Muhammadiyah yang terus membangun itulah kemudian pemerintah juga turut membantu Muhammadiyah sebagai wujud penghargaan negara.

Haedar juga mengatakan bahwa Presiden terkesan dengan nuansa modern Kampus Terpadu Madrasah Mu'allimin tetapi juga ada unsur terhadap hal-hal yang klasik.

Kampus Terpadu Mu'allimin Muhammadiyah yang diresmikan Presiden berada di Padukuhan Gunung Bulu Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu Bantul. Di dalam kampus terpadu, juga diresmikan bangunan rusunawa, asrama serta masjid. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden yang dilanjutkan melakukan peninjauan tan-

pa pidato.

Dikemukakan, bangunan rusunawa dan asrama dibangun pemerintah. "Ini sebagai wujud penghargaan pemerintah terhadap Muhammadiyah khususnya dan simpati terhadap madrasah Mu'allimin," jelas Haedar.

Madrasah Mu'allimin sebut Haedar, adalah madrasah yang bersejarah. Sehingga penghargaan pemerintah bukan tanpa alasan. "Lahir tahun 1918 lalu tahun 1923 namanya Kweek School. Karena 10 tahun menggunakan istilah Kweek School itu banyak diintimidasi oleh regulasi Pemerintah Kolonial harus menyesuaikan dengan aturannya maka diubah menjadi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Tetapi intinya sama dengan tujuan awalnya yakni sekolah untuk menghasilkan pemimpin dan sekolah untuk meng-

hasilkan pendidik," tutur Haedar.

Selain itu Presiden meresmikan masjid yang dibangun oleh Fahmi Yendra, Pengusaha Muda Muhammadiyah yang membantu pembangunan masjid tersebut. Masjidnya pun diberi nama Masjid Hj Yuliana Muallimin. "Fahmi adalah pengusaha Muhammadiyah, anak muda yang membantu membangun dan atas nama ibundanya sebagai bentuk dari *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua). Ini hal yang langka di zaman modern dimana anak begitu rupa ingin berbuat baik pada orang tua. Nah ini masjid perpaduan antara modern dan klasik," jelas Haedar.

Kampus Terpadu Madrasah Mu'allimin berdiri di atas tanah milik Muhammadiyah seluas 5,6 ha. Kini sudah terbangun kampus, asrama, perpustakaan, klinik, embung dan masjid. (Fsy)-f

PENYELIDIKAN KASUS BANJARNEGARA

KPK Dalam Persyaratan Lelang Proyek

JAKARTA (KR) - Konfirmasi telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap saksi terkait dugaan adanya perintah dari tersangka Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) soal pengaturan persyaratan lelang mengerjakan proyek di Kabupaten Banjarnegara. Sehubungan hal itu, KPK memeriksa Nursidi Budiono, Direktur CV Karya Bhakti sebagai saksi untuk tersangka Budhi dan kawan-kawan.

Saat ini KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. "Saksi dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya perintah dari tersangka BS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (10/9).

Perintah itu, jelasnya, untuk melakukan pengaturan dalam hal persyaratan lelang yang harus memiliki surat rekomendasi/dukungan 'ready mix' bagi calon pemenang lelang untuk mengerjakan paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017-2018.

Selain Nursidi, KPK Kamis (9/9) telah memeriksa tiga saksi lainnya untuk ter-

sangka Budhi dan kawan-kawan, yaitu Hadi Suwarno, Presiden Direktur PT Adi Wijaya, Siti Rustanti, Direktur CV Puri Agung dan Mistar selaku pengemudi/sopir PT Bumi Rejo.

"Para saksi hadir dan tim penyidik masih terus melakukan pendalaman melalui keterangan para saksi tersebut, antara lain terkait harus adanya dukungan dari PT SW (Sambas Wijaya) bagi peserta lelang yang akan mengikuti lelang proyek paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017-2018," tutur Ali Fikri.

Pemeriksaan empat saksi dilakukan di Gedung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Budhi dan Kedy Afandi (KA) sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut, pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses Budhi saat mengikuti proses Pilkada untuk memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. (Ful)-f

JAKSA AGUNG GURU BESAR UNSOED

Sumber dari Hukum Adalah Moral

PURWOKERTO (KR) - Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa, sumber dari hukum adalah moral. Jadi dalam moral ada hati nurani.

"Ingat! Sumber dari hukum adalah moral dan di dalam moral ada hati nurani. Saya sebagai Jaksa Agung tidak membutuhkan jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral dan saya juga tidak butuh jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas. Namun, yang saya butuhkan adalah para jaksa yang pintar dan berintegritas," kata Jaksa Agung di Purwokerto, Jumat (10/9).

Burhanuddin mengatakan hal itu dalam pidato berjudul 'Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum)'. Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ia bacakan saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum dan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto yang digelar di Auditorium Graha Widyatama Unsoed Purwokerto serta daring melalui Zoom dan Youtube. Menurut Jaksa Agung, profesionalitas

seorang jaksa akan sempurna jika dapat menyeimbangkan antara intelektual dan integritas. "Saya sangat meyakini jika setiap manusia memiliki dan mampu untuk menggunakan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak menghendaki para jaksa melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam *text book*, tetapi ada dalam hati nurani," katanya lagi.

Dengan demikian, ujar Burhanuddin, jangan sekali-kali menggadaikan hati nurani, karena itu adalah anugerah termurni yang dimiliki manusia dan itu adalah cerminan dari sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Dalam pidatonya, Burhanuddin mengatakan, keadilan adalah tujuan utama dari hukum, tetapi bukan berarti tujuan hukum yang lain, yaitu kepastian dan kemanfaatan terpinggirkan.

"Ketika keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum saling menegaskan, maka hati nurani menjadi jembatan untuk mencapai titik neraca keseimbangan," katanya. (Ant)-f

SUBSIDI KUOTA DATA INTERNET

Mulai Hari Ini Bantuan Disalurkan

JAKARTA (KR) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal menyalurkan bantuan kuota internet untuk guru, siswa, mahasiswa dan dosen mulai Sabtu (11/9) hari ini. "Bantuan kuota tersebut akan diberikan setiap bulannya hingga November 2021.

Tanggal 11 September kuota akan dikirim," ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di SMAN 71 Jakarta Timur, Jumat (10/9).

Dijelaskan, bantuan kuota internet ini akan disalurkan untuk bulan September sampai November 2021. Periode penyaluran dilakukan setiap tanggal 11-15 di setiap bulannya. Kuota gratis internet ini berlaku dan bisa digunakan selama 30 hari sejak diterima. Keseluruhan bantuan kuota internet merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo.

Bantuan kuota internet dari Kemendikbudristek bulan pertama disalurkan pada 11-15 September. Di bulan kedua pada 11-15 Oktober, dan ketiga di 11-15

November. Kuota berlaku untuk 30 hari sejak diterima.

Calon penerima bantuan kuota data internet harus memenuhi persyaratan. Untuk peserta didik pada PAUD dan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), harus terdaftar di aplikasi Dapodik, memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orangtua/anggota keluarga/wali. Untuk pendidik PAUD dan jenjang Dikdasmen harus terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif, serta memiliki nomor ponsel aktif.

Untuk mahasiswa, harus terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntutkan gelar ganda (double degree), memiliki nomor ponsel aktif. Untuk dosen, terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif, memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP) dan memiliki nomor ponsel aktif.

Program bantuan ini untuk mendukung Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Rp 5,4 triliun dengan target penerima 38,1 juta pelajar dan tenaga pendidik. (Ati)-f

KEBAKARAN LAPAS TANGERANG

Penyidik Temukan Unsur Pidana

JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya menemukan adanya unsur pidana dalam kasus kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang. Status perkara kasus yang menewaskan 44 warga binaan itu pun telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

"Dari gelar perkara Tim Penyidik ada dugaan pidana di Pasal 187 KUHP, 188 jo 359 KUHP tentang kealpaan serta kelalaian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta, Jumat (10/9).

Menurut Yusri, penyidik tengah melengkapi administrasi untuk pemanggilan para saksi dalam tahap penyidikan atas kasus kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan Lapas Blok C2. Selain menewaskan 44 orang, akibat kebakaran itu puluhan warga binaan lainnya luka-luka. Sejauh ini belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. "Belum ada tersangka," ujar Yusri.

Yusri mengungkapkan, dari hasil gelar perkara penyidik menemukan unsur pidana atas peristiwa yang terjadi pada Rabu (8/9) dini hari. "Kalau kemarin masih dugaan, sekarang dipastikan ada pidananya," tegasnya.

Dalam kasus kebakaran ini, penyidik sudah memintai keterangan 22 saksi, baik warga binaan yang selamat maupun petugas lapas. Pemeriksaan para saksi dibagi jadi tiga klaster, yakni petugas lapas, saksi-saksi dari para korban atau warga binaan yang selamat dan pendamping napi. (Imd)-f

4 TAHAP KIRIMAN VAKSIN KEMBALI TIBA

Abaikan Prokes Rugikan Banyak Pihak

YOGYA (KR) - Kendati Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY sudah turun ke Level 3, Pemda DIY tetap meminta masyarakat untuk berhati-hati. Semua pihak tetap wajib menerapkan 5M dalam setiap aktivitas termasuk di lingkungan permukiman, karena masih ditemukan kerumunan yang bisa berpotensi memunculkan kasus baru. Begitu pula untuk sistem kerja, maksimal 50 persen, pengaturannya perlu dibuat seefisien mungkin.

"Selama pandemi belum berakhir, kami tidak pernah bosan mengingatkan masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai kasusnya naik lagi, karena tindakan atau sikap abai sebagian anggota masyarakat. Kalau hal itu sampai terjadi, akan ada banyak pihak yang dirugikan," tandas Sekda DIY K Basakara Aji di Kepatihan Yogyakarta, Jumat (10/9).

Basakara Aji menyatakan, status PPKM Level 3 berdampak pada adanya sejumlah pelanggaran termasuk untuk restoran atau rumah makan dan kafe terutama outdoor,

dapat melayani makan di tempat (dine-in), namun tetap dengan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Sedangkan untuk persiapan pembelajaran tatap muka (PTM), bagi sekolah yang akan menggelar pembelajaran luring, harus sudah mendapatkan persetujuan dari Disdikpora DIY, serta guru dan siswanya sudah ter-vaksin. Nanti juga ada pengisian formulir kesiadaan atau izin dari orangtua siswa terkait PTM.

"Kalau untuk pariwisata, seperti yang pernah saya sampaikan, ada beberapa destinasi yang diperkenankan melakukan uji coba asal telah mendapatkan rekomendasi dari Kemenparekraf. Itu pun harus sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Karena itu, saya berharap restoran, hotel, destinasi wisata, segera mengurus dan mendaftar QR Code PeduliLindungi. Supaya kalau nanti pada saatnya sudah boleh buka, bisa langsung jalan," terangnya.

Menurut Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji, kasus konfirmasi positif Covid-19 di DIY bertam-

bah 212 menjadi 152.722 kasus. Pasien sembuh bertambah 659 menjadi 141.510 kasus. Sementara kasus meninggal bertambah 13 menjadi 5.036 kasus.

Indonesia kembali kedatangan vaksin Covid-19, Jumat (10/9). Bahkan empat tahap sekaligus, yakni pengiriman/kedatangan tahap ke-52, 53, 54, dan 55. Vaksin ini berasal dari berbagai merk berbeda.

Pertama vaksin Pfizer berjumlah 639.990 dosis berupa vaksin jadi. Vaksin ini tiba pukul 09.15 WIB yang merupakan kedatangan vaksin tahap ke-52. Kemudian kedatangan tahap ke-53 berupa 2.079.000 dosis CoronaVac, lalu vaksin AstraZeneca dengan jumlah 615.000 dosis yang merupakan vaksin jadi, tiba pukul 10.10 WIB. Selanjutnya tahap ke-55 vaksin AstraZeneca dalam bentuk jadi berjumlah 358.700 dosis hibah dari Pemerintah Prancis.

"Vaksin AstraZeneca ini merupakan bantuan dari Pemerintah Prancis melalui mekanisme COVAX," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Ria/Ira/San)-d

KAKORLANTAS POLRI DAN DIRUT JASA RAHARJA

Pantau Penyekatan di Perbatasan Jateng-DIY



KR-M Thoha

Kaca spion sepeda motor juga menjadi perhatian Kakorlantas Polri dan Dirut Jasa Raharja.

Jasa Raharja sempat menyerahkan dan memasangkan helm baru kepada pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm serta menyerahkan masker. Kondisi kaca spion sepeda motor memperoleh perhatiannya. Keduanya juga menypa masyarakat

yang antre mengikuti vaksinasi dan menyerahkan bantuan sembako kepada beberapa orang.

Lokasi yang dikunjungi, kata Kakorlantas, merupakan perbatasan wilayah Jateng dan DIY. Akses daerah Sleman-Magelang juga merupakan akses menuju

tempat wisata. Setiap Jumat dilakukan pengaturan pembatasan/pengetatan di lokasi wisata. Kemarin di lokasi Tugu Ireg Salam juga dilakukan vaksinasi untuk sekitar 250 orang. "Saya lihat kesadaran masyarakat sudah bagus, mempedomani protokol kesehatan. Yang terpenting memakai masker," kata Kakorlantas.

Menurutnya, setiap batas wilayah antarkota dilakukan pengaturan pembatasan, pengetatan, agar pengendalian mobilitas masyarakat dapat diatur, mana yang tertib memakai masker, mana yang mesti harus dirandom, agar kontrol ini menjadi koreksi bagi masyarakat agar tetap patuh terhadap prokes. (Tha)-d